BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹ Unsur penangkapan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sendiri tidak mengatur tentang penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, oleh karenanya kita harus membedakan antara penangkapannya dengan surat perintah dengan tanpa surat perintah (tertangkap tangan).

Penjelasan jangka waktu penangkapan, penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, dan penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia yang dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya.² Definisi penangkapan,³ jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat

---

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 Ayat 20.

²Adwar Adhyatma, *Analisis Mengenai Penangkapan dan Penahanan Dalam Prakteknya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 15.

³Indonesia, *Loc. Cit.*

materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Mengapa perlu diatur jangka waktu yang pasti untuk memberitahukan surat penangkapan kepada pihak keluarga tersangka? karena banyak kasus yang terjadi penangkapan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga, contohnya kasus penangkapan Bambang Widjojanto yang ditangkap tanpa surat penangkapan dan tidak ada penjelasan pengangkapannya.⁴

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013, frasa "segera" dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari" dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari". Penjelasan dari amar putusan nomor 3/PUU-XI/2013 adalah si pemohon meminta dibatalkan, karena frasa "segera"

---

⁴Berita Prima, "Penangkapan Bambang Widjojanto Dilakukan tanpa Pemberitahuan" [berita], 23 Januari 2015.

tidak menjamin kepastian hukum yang membuat warga negara diperlakukan tidak sama di depan hukum (diskriminatif), dan Mahkamah Konstitusi hanya menafsirkan frasa “segera” sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7(tujuh) hari. Adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dialami tersangka pada saat penangkapan, sebagaimana yang telah diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam skripsi ini dengan judul “Prosedur Penangkapan Tersangka Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata “segera” dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)?
2. Bagaimana penerapan Pasal 18 ayat (3) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 3/PUU-XI/2013

terhadap penerapan Pasal 18 ayat (3) khususnya pemaknaan kata “segera” dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan diatas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 terhadap penerapan 18 ayat (3) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) oleh penyidik POLRI khususnya pemaknaan kata “segera” waktunya tidak pasti dan merata bagi WNI (Warga Negara Indonesia).
2. Untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan kepada tersangka.

1.4 Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Menurut Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:⁵
3. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terdanguna menemukan tersangkanya.
5. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
6. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

---

⁵Indonesia, Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*.

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

8. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

9. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

10. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

11. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

12. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

13. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

14. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
17. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
18. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
19. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka

untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

20. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
21. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
22. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
23. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

24. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
25. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
26. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
27. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

28. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
29. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
30. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
31. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
32. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.

33. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu dengan alasan-alasan hukum hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶ Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁷ Dalam metode penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara deskriptif dari putusan atas sebuah kasus serta dampak atau implikasi dari putusan tersebut.

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keenam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 119

⁷*Ibid.*, hlm. 96

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh bahan hukum dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-makalah, artikel, serta internet dan sebagainya.⁸
3. Bahan Non Hukum, yakni dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.⁹

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang sedang disusun ini berjudul “Prosedur Penangkapan Tersangka Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-XI/2013)”. Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

---

⁸Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 67

⁹*Ibid.*, hlm. 69

Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II   Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori konstitusi, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori kepastian hukum. Teori-teori tersebut dibangun dalam rangka menjadi pisau analisis dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

BAB III   (Tinjauan Tentang Penangkapan Tersangka Di Indonesia)

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai pengaturan penangkapan.

BAB IV (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013)

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3/PUU-XI/2013 pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bertentangan dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada Bab I (Fendahuluan) melalui pendapat hukum penulis.

BAB V Penutup

Pada Bab V penelitian ini akan membuat suatu kesimpulan dari analisa penulis guna menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini secara sederhana serta mencoba memberikan saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Saran yang diberikan penulis semoga dapat memberikan suatu kontribusi pikiran dalam persoalan-persoalan ketatanegaraan di Indonesia.